

Evaluasi LKPJ Jangan Sekadar Formalitas, Pansus DPRD Kota Bandung Dorong RKPD 2027 Lebih Menyentuh Kebutuhan Warga

BANDUNG, Prolite – Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2025 diminta tidak berhenti pada urusan administratif semata. DPRD Kota Bandung menekankan, evaluasi tersebut harus menjadi pijakan dalam menyusun arah pembangunan yang lebih konkret dan berdampak bagi masyarakat.

Anggota Panitia Khusus (Pansus) 15 DPRD Kota Bandung, Aan Andi Purnama, mengatakan pembahasan LKPJ harus mampu melahirkan rekomendasi strategis yang nantinya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027.

Menurut dia, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya diukur dari tingginya serapan anggaran atau capaian administratif. Yang paling penting, kata dia, program pemerintah harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Baca Juga: Teror Badut Gendong Sambangi Braga Kota Bandung usai Perdana Tayang pada 6 Mei 2026

“Pembangunan jangan hanya terlihat baik di atas kertas. Tapi harus terasa langsung dalam kehidupan sehari-hari warga,” ujarnya.

Aan menilai tantangan fiskal ke depan perlu diantisipasi sejak sekarang. Terutama potensi berkurangnya transfer anggaran dari pemerintah pusat ke daerah. Karena itu, Pemkot Bandung didorong lebih kreatif dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurutnya, masih banyak sektor yang bisa dioptimalkan untuk mendongkrak pendapatan daerah. Mulai dari retribusi parkir, sektor pariwisata, hingga usaha kuliner dan restoran yang selama ini menjadi kekuatan Kota Bandung.

Baca Juga: Pekerjaan BRT Terus Dilakukan Dishub Kota Bandung

Evaluasi LKPJ Jangan Sekadar Formalitas, Pansus DPRD Kota Bandung Dorong RKPD 2027 Lebih Menyentuh Kebutuhan Warga

Namun demikian, peningkatan PAD tetap harus dibarengi efisiensi anggaran dan tidak membebani masyarakat. “Inovasi pendapatan daerah penting, tetapi jangan sampai justru memberatkan warga,” katanya.

Selain PAD, Aan juga menyoroti pentingnya optimalisasi aset daerah dan penguatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Menurut dia, BUMD harus lebih adaptif membaca peluang usaha sekaligus mampu menjawab tantangan yang berkembang.

“BUMD harus bisa melihat potensi dan menentukan langkah strategis agar kontribusinya terhadap daerah lebih besar,” tuturnya.

Dalam pembahasan LKPJ tersebut, DPRD juga menaruh perhatian terhadap sektor pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur dan permukiman.

Di bidang pendidikan, Aan menilai pemerataan akses pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah. Ia mendorong percepatan pembangunan ruang kelas dan sekolah baru di wilayah yang masih kekurangan fasilitas pendidikan.

“Masih ada anak yang belum mendapatkan akses pendidikan optimal. Ini harus menjadi prioritas,” ucapnya.

Sementara di sektor kesehatan, ia menekankan pentingnya penguatan layanan promotif dan preventif melalui optimalisasi peran puskesmas. Menurut dia, pola layanan kesehatan tidak bisa hanya bertumpu pada pengobatan karena akan berdampak pada tingginya pembiayaan kesehatan daerah.

“Pencegahan harus diperkuat. Puskesmas perlu lebih aktif melakukan edukasi kesehatan kepada masyarakat,” katanya.

Aan juga mendorong integrasi digitalisasi layanan kesehatan, termasuk sinkronisasi rekam medis antara puskesmas dan rumah sakit agar pelayanan lebih cepat dan efisien. Selain itu, validasi data penerima bantuan BPJS dinilai penting agar subsidi kesehatan tepat sasaran.

Di sektor infrastruktur, persoalan banjir dan tata kota juga menjadi sorotan. Menurut dia, penanganan banjir harus dilakukan secara lebih terukur dan berbasis data. Konsep

Evaluasi LKPJ Jangan Sekadar Formalitas, Pansus DPRD Kota Bandung Dorong RKPD 2027 Lebih Menyentuh Kebutuhan Warga

pembangunan berkelanjutan seperti sponge city dinilai dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi genangan di sejumlah kawasan rawan banjir.

Selain itu, penataan kabel udara dan optimalisasi ruang terbuka hijau juga dinilai penting untuk mendukung wajah Kota Bandung yang lebih tertata dan nyaman.

Aan memastikan seluruh hasil pembahasan pansus akan dirumuskan menjadi rekomendasi yang lebih tajam, aplikatif, dan terukur agar dapat diakomodasi dalam RKPD 2027.

“Jangan sampai rekomendasi yang sudah disusun serius hanya menjadi dokumen administratif. Hasil evaluasi ini harus menjadi dasar perbaikan pembangunan Kota Bandung ke depan,” pungkasnya.



Baca Selanjutnya
Bishop Briggs Comeback dengan 'Blood From A Stone', Lagu Tentang Luka Lama yang Belum Benar-Benar Sembuh